OMBUDSMAN DORONG PIHAK TERKAIT SELESAIKAN KASUS IJAZAH PALSU DI SIMEULUE

Kamis, 10 Agustus 2023 - Ilyas Isti

Siaran Pers

Nomor : 023/PW.01/8/2023

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2023

Banda Aceh- Terkait penggunaan ijazah palsu oleh CPNS/PNS di Kabupaten Simeulue, Ombudsman Aceh sedang melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Substansi masalah kepegawaian berada dalam kewenangan BKN dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Khusus penggunaan ijazah palsu oleh PNS sudah ada aturan yang jelas, salah satunya Perka BKN No. 25 tahun 2015.

"Hasil koordinasi kami dengan BKN Regional XIII, ada 112 kasus yang sudah selesai diperiksa. Kita harap Tim Wasdal BKN sebagai salah satu instansi yang berwenang akan melanjutkan pemeriksaan isu ini sampai dengan tuntas," ungkap Dian Rubianty Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh pada akamis (10/8) di Banda Aceh.

Selain BKN, BPK juga sudah menerbitkan LHP. Jika ada dugaan penggunaan ijazah palsu atau ijazah "aspal" (asli tapi palsu) yang menimbulkan kerugian negara, Ombudsman Aceh mendorong tindak-lanjut dari Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kewenangan menentukan dokumen palsu atau tidak, "aspal" atau bukan adalah domainnya APH. Jadi kami (Ombudsman Aceh) meminta agar segera ada tindak lanjut APH dan instansi terkait. Jika ada warga yang merasa dirugikan dan laporan mereka tentang masalah ini ke instansi terkait tak mendapat tanggapan, warga bisa melaporkan penundaan layanan atau pengabaian seperti itu pada Ombudsman," lanjut Dian.

Kasus ini harus diselesaikan secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Apalagi mengingat di Perka BKN No. 25 Tahun 2015 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tindakan administratif dan hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap CPNS/PNS yang menggunakan ijazah palsu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, tidak mengesampingkan berlakunya ketentuan pidana.

Ombudsman Aceh akan melakukan monitoring dan koordinasi, sesuai dengan tugas dan kewenangannya terhadap hal ini.

"Kita berharap segera ada penyelesaian yang maslahah untuk semua pihak," tutup Dian.